

HARMONISASI NAHDLATUL ULAMA (NU) PADA MASA

PENDUDUKAN JEPANG TAHUN 1942-1945

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)
Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam**



Oleh:

Agistina Cahyaningsasi

NIM: A92215063

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Agistina Cahyaningsasi

Nim : A92215063

Jurusan : Sejarah dan Peradaban Islam (SPI)

Fakultas : Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 17 Mei 2019

Saya yang menyatakan



Agistina Cahyaningsasi

NIM. (A92215063)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Agistina Cahyaningsasi (A92215063) dengan judul
“**HARMONISASI NAHDLATUL ULAMA (NU) PADA MASA
PENDUDUKAN JEPANG TAHUN 1942-1945**” ini telah diperiksa dan
disetujui untuk diujikan.

Tanggal,
18 Juni 2019
Pembimbing,



Drs. H. Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 195509041985031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini atas nama Agistina Cahyaningsasi (A92215063) telah diuji oleh Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 04 Juli 2019

Ketua/Penguji I

Drs. H. Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 195509041985031001

Penguji II

Drs. H. M. Ridwan, M.Ag
NIP. 195907171987031001

Penguji III

Dr. H. Achmad Zuhdi DH, M.Fil.I
NIP. 196110111991031001


Sekretaris/Penguji IV

Dra. Lailatul Huds, M.Hum
NIP. 196311132006042004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya




Dr. H. Agus Aditoni, M.Ag
NIP. 19621002199203100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AGISTINA CAHYANINGSASI
 NIM : A92215063
 Fakultas/Jurusan : ADAB DAN HUMANIORA /SPI
 E-mail address : agistinacahya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

HARMONISASI NAHDLATUL ULAMA (NU) PADA MASA

PENDUDUKAN JEPANG TAHUN 1942 - 1945

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 JULI 2019

Penulis



(AGISTINA CAHYANINGSASI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Harmonisasi Nahdlatul Ulama Pada Masa Pendudukan Jepang tahun 1942-1945*. Memiliki tiga fokus penelitian, yaitu Bagaimana keadaan masyarakat NU pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Bagaimana Harmonisasi yang dibentuk antara NU dengan pemerintah Jepang. Benarkah Pemerintah Jepang di Indonesia memiliki peran untuk kemajuan NU.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis digunakan peneliti bertujuan untuk menghasilkan bentuk dan proses dari peristiwa sejarah dan untuk menjelaskan Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) dan hubungannya dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori integrasi sosial yang dikenalkan oleh Emile Durkheim yaitu integrasi sistem adalah proses penyesuaian sistem unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Heuristik, Kritik, Interpretasi (penafsiran) dan Historiografis.

Dari Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : (1) NU merupakan organisasi yg dibentuk untuk mempertahankan praktik keagamaan tradisional oleh para Kyai desa dan kondisi NU masa Belanda dan Jepang berbeda, lebih leluasa melakukan kegiatan agama masa pendudukan Jepang. (2) Harmonisasi NU dan Jepang terlihat dari sikap Jepang dan kebijakannya yang banyak menguntungkan NU dan umat Islam.(3) Kedatangan Jepang ke Indonesia berdampak pada kemajuan NU dan dengan kemajuan pada NU, Kyai Hasyim menjadi ketua shumubu dan sebagai dewan penasihat organisasi yang lain, para santri diberi pelatihan kemiliteran, dan para kyai tradisional memiliki kedudukan yang tinggi.

Kata Kunci : Harmonisasi, Nahdlatul Ulama, Organisasi

umat Islam dan terbentuklah MIAI (Majlis Islam A'laa Indonesia). Tahun 1939, lewat MIAI NU bergabung dengan GAPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) mengusulkan pada pemerintah Belanda untuk Indonesia berparlemen.

Kedatangan Jepang dengan menaklukkan wilayah Hindia-Belanda pada tahun 1942, kebijakan Jepang adalah menghapuskan hal-hal yang berbau Barat dan Jepang menciptakan hubungan baik dengan Islam. Dengan hubungan baik yang dibangun dengan Islam terutama organisasi NU. Usaha-usaha yang dilakukan Jepang untuk mendekati kalangan masyarakat NU dan Islam di Indonesia adalah dengan melakukan kegiatan diantaranya adalah melakukan pelatihan-pelatihan militer kepada para ulama, pengakuan yang diberikan kepada ustad-ustad madrasah dan pesantren sebagaimana disampaikan oleh Gunseikan dalam permusyawaratan pemimpin-pemimpin pesantren dan madrasah seluruh Jawa dan Madura di Gedung Masyumi tanggal 18-20 Januari 1944.

Pada akhir bulan yang sama Gunseikan memberikan edaran kepada para Residen di semua provinsi Jawa yang berisi konsesi penting kepada kyai dan ulama dalam kegiatan agama. Sejak saat itu sebagian besar pemimpin agama dibebaskan dari kontrol langsung para pejabat pemerintahan. Kyai dan ulama tidak perlu lagi meminta izin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agama Islam atau pertemuan agama. Kegiatan keagamaan yang dilakukan tidak terlalu atur oleh pemerintah berbeda halnya dengan ketika pada pemerintahan Belanda di Indonesia.

bersikap baik kepada Belanda atau terhadap tentara Jepang yang akan menuju Jawa. Kekuatan militer Jepang telah disadari oleh banyak kalangan tokoh elit NU. Sejak Awal tokoh-tokoh NU sudah berniat untuk melakukan kerja sama dengan Jepang yang utamanya bertujuan untuk membebaskan bangsa dan umat Islam Indonesia dari penjajahan Belanda.

Sikap masyarakat NU kepada Jepang dibahas dalam rapat pimpinan NU di Surabaya yang juga dihadiri oleh K.H. Machfud Siddiq, ketua HBNO. Pro terhadap Jepang sudah merupakan keputusan dari NU, tetapi hal tersebut sejatinya adalah keinginan dari eli-elit muda NU, hingga pada awal kedatangan Jepang terjadi perbedaan cara pendekatan antara kalangan tua dan kalangan muda. Kalangan tua diwakili oleh kiai-kiai *sepuh* dan kalangan muda terhadap Jepang.

Untuk membahas lebih dalam mengenai beberapa uraian diatas, kiranya penting beberapa hal disusun untuk menambah wawasan pengetahuan kita mengenai keadaan masyarakat Nahdlatul Ulama pada masa pendudukan Jepang yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat pada masa itu. Oleh karena itu penulis ingin menulis tentang “**HARMONISASI NAHDLATUL ULAMA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG TAHUN 1942-1945**”.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pembelajaran mengenai Harmonisasi warga Nahdlatul Ulama dengan pendudukan Jepang di Indonesia sehingga dapat diambil pembelajaran untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Pendekatan dan Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian pustaka dengan tujuan untuk mengungkap mengenai Harmonisasi Nahdlatul Ulama pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Adapun dalam judul yang penulis kemukakan adalah kata harmonisasi yang dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pengharmonisan atau dalam pengertian lain adalah suatu upaya untuk mencari keselarasan. Keselarasan yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah hal positif yang dapat diperoleh dari hadirnya Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945 yang pada masa itu banyak terjadi hal-hal yang berpengaruh positif dan negatif, penulis ingin meneliti hal positif yang dapat diambil dengan adanya pendudukan Jepang di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan sejarah digunakan untuk mengungkap peristiwa sejarah mengenai harmonisasi masyarakat NU pada masa pendudukan Jepang. Skripsi ini juga akan menggunakan pendekatan Sosiologi, pendekatan sosiologi adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Ilmu

Pada tahun 1924, pemerintahan Kemalis Republik Turki menghapus jabatan Khalifah. Hal ini memberikan dorongan kepada pembicaraan tentang teori politik Islam dan upaya-upaya untuk membangun institusi-institusi pan-Islami yang baru. Daulah Utsmaniyah sudah dihapuskan dan setahun sebelumnya, dan khalifah yang terakhir, setelah semua kekuatannya dilucuti dan dalam prakteknya tidak lebih dari figur yang tidak bisa berbuat apa-apa. Penghapusan khilafah menyebabkan banyak masyarakat Muslim terutama pada daerah jajahan Inggris dan Belanda merasa sangat terpukul dan kehilangan orientasi. Masyarakat-masyarakat pada daerah terjajah merasakan memiliki kebutuhan akan kepemimpinan politik yang independen meskipun kepemimpinan hanya bersifat simbolik semacam itu. Kaum Muslim di India melakukan kampanye dalam rangka pemulihan kembali Daulah Utsmaniyah, dan beberapa calon menunjukkan keinginan menyandang gelar Khalifah.

Calon yang serius dalam hal ini adalah penguasa Mekkah yaitu Syarif Husain. Syarif Husain adalah yang menguasai kota-kota suci Islam setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah pada tahun 1916. Dilakukan pembentukan dewan penasihat Khalifah oleh Syarif Husain yang termasuk diantaranya adalah dua orang Asia Tenggara yang bermukim di Mekkah, dan mengadakan sebuah kongres Haji (*mu'tamar al-hajj*) di Mekkah pada

terkenal yakni Rasyid Ridha, merupakan penyelenggara kongres Kairo dan Ibn Sa'ud dan pengikutnya adalah kaum wahabi yaitu pengikut kaum puritan yang paling dogmatis dalam Islam. Kaum Wahabi terkenal dengan sikap kerasnya menentang segala sesuatu yang berkenaan dengan pemujaan terhadap wali dan kepada orang yang sudah meninggal. Selama menududuki kota Makkah pada awal abad ke-20 wahabi menghancurkan banyak makam di dalam dan sekitar kota. Hal yang dilakukan oleh kaum Wahabi inilah yang menimbulkan kekhawatiran bagi kaum tradisional Indonesia yang sangat terikat dengan praktek-praktek keagamaan yang dianggap tidak baik oleh kaum Wahabi. Peristiwa yang terjadi tersebut merupakan hal yang sangat mencemaskan dan membuat kekhawatiran yang berlebihan bagi kaum tradisional Indonesia yang merupakan menjunjung tinggi praktek-praktek keagamaan seperti ziarah kubur.

Muhammadiyah sejak awal lebih memilih untuk pergi ke kongres di Kairo karena keterlibatan dari Rasyid Ridha. Muhammadiyah memang sejak awal lebih dekat dengan pembaru Mesir dari pada kaum puritan wahabi. Namun, pemimpin Sarekat Islam Tjokroaminoto merasa keberatan dengan peranan raja Fu'ad dalam kongres Mesir ini, dicurigai sebagai siasat tersembunyi Inggris yang ingin menguasai dunia Islam dan lebih menyarankan agar datang pada kongres Makkah yang diadakan oleh Ibn Sa'ud. Kaum tradisional juga memilih untuk datang pada kongres Makkah, dengan alasan yang berbeda yakni untuk menghormati

Cabang dan di Jawa Barat 10 cabang. Pada tahun 1930-an Nahdlatul Ulama sudah mendapatkan tempat di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sumatra Selatan. Nahdlatul Ulama memiliki keinginan untuk menjadi organisasi yang berskala nasional yang dapat menyelenggarakan muktamarnya di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam masalah pendidikan Nahdlatul Ulama memiliki peran dalam membantu pesantren maupun sekolah, dan pendirian sekolah-sekolah tersebut semakin bertambah. Dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang ke delapan tahun 1933 dibuatlah rencana pembuatan sekolah guru di Solo. Usulan tersebut disampaikan oleh Kyai Wahab Hasbullah, rencana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan guru yang dianggap kurang pada madrasah-madrasah. Nahdlatul Ulama pada awal berdirinya memang tidak secara tegas membicarakan tentang pembaruan pendidikan, tetapi Nahdlatul Ulama memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan khususnya pendidikan tradisional yang menurut Nahdlatul Ulama benar-benar harus dipertahankan.

Hubungan antara kaum pembaruan yang pada awal yang sangat tegang pada tahun-tahun awal berdirinya Nahdlatul Ulama, secara bertahap kembali diperbaiki dan sekitar pertengahan tahun 1930-an sudah terlihat tanda-tanda kemauan baik dari kedua belah pihak. Pada muktamar ke-11 tahun 1936 di Banjarmasin Kyai Hasyim Asy'ari menghimbau pada umat Islam Indonesia agar menahan diri untuk tidak melontarkan kritik satu sama lain dan mengingatkan bahwa satu-satunya perbedaan

Hubungan para pemimpin Muslim di Indonesia dengan Jepang secara keseluruhan nampak terlihat lebih baik daripada hubungan mereka dengan penguasa Hindia Belanda, meskipun pada awal sedikitn ada pembenturan antara Islam dan Jepang dalam hal yang dianggap sangat sensitif dan merupakan suatu prinsip. Pihak Jepang menginginkan bahwa rakyat Indonesia untuk melakukan *seikerei* yang merupakan acara ritual yang dipercayai oleh Jepang yaitu acara ritual yang berupa membungkukkan badan jearag kaisar. Ritual ini menyerupai *ruku'* dalam sholat tetapi terjadi penolakan dari para kaum muslim karena dirasa tidak sesuai dengan ajaran tauhid dalam Islam dan dianggap tidak benar. Kebanyakan para ulama tampaknya menghindari saat-saat dimana mereka diminta melakukan *seikerei*, tetapi melakukan apabila terpaksa.

Menurut sumber Nahdlatul Ulama sebelumnya ada protes dari para ulama terkemuka. Kyai Hasyim As'ari dan Kyai Machfud Siddiq bahkan dipenjara beberapa bulan pada tahun 1942 karena penolakan terhadap *seikerei*. Ketika Kyai Hasyim Asy'ari dan Kyai Machfud Siddiq masih didalam penjara diadakan rapat pimpinan dilakukan di Jakarta dan memilih pengurus pusat yang baru, dimana Kyai Hasyim Asy'ari tetap menjadi Rois Akbar sedangkan ketua Tanfidziyah yakni Kyai Macfudz Siddiq digantikan oleh Kyai Wahab Hasbullah. Setelah Kyai Hasyim Asy'ari dan Kyai Machfud Siddiq dibebaskan, masih ada tetap diminta oleh pihak Jepang untuk melakukan *seikerei*. baru setahun kemudian, setelah kekalahan tentara Jepang dan keinginan mereka mendapatkan

karena tuduhan memberontak lalu menghabiskan waktu empat bulan di dalam penjara.

K.H Hasyim Asyari tidak menyerah dengan keadaan yang saat itu terjadi, K.H Hasyim Asyari tetap melakukan diplomasi untuk kemedekaan Indonesia. Selain itu K.H Hasyim Asyari didampingi oleh putranya yakni K.H Wachid Hasyim. Ketika K.H Hasyim Asyari diundang pada pertemuan dengan pemimpin tetara Jepang di Jakarta dibahaslah tentang pembentukan *shumubu*. Perjuangan K.H Hasyim Asyari dan K.H Wachid Hasyim pada saat itu membuahkan hasil, *shumubu* terbentuk dan yang kemudian K.H Hasyim Asyari ditunjuk oleh Jepang untuk memimpin *shumubu* yang merupakan bentukan Jepang tahun 1942. Tetapi kemudian kepemimpinan diserahkan kepada putranya yakni K.H Wachid Hasyim, oleh K.H Wachid Hasyim berupaya untuk mendirikan kantor urusan Agama yang didirikan di daerah-daerah (*shumuka*) dengan dipimpin oleh *shumuka-cho*.

Pembentukan *shumuka* sendiri memiliki tujuan yang disampaikan oleh K.H Wachid Hasyim yang memiliki daya dan upaya untuk memperkuat konsolidasi urusan agama di berbagai daerah untuk keperluan perjuangan bangsa Indonesia secara umum. Shumubu menguntungkan bangsa Indonesia baik dibidang sosial-keagamaan, pendidikan maupun politik. Bahkan jika berbicara lebih jauh lagi shumubu dalam perkembangan administrasinya memberikan manfaat yang banyak kepada bangsa Indonesia karena ditetapkannya menjadi departemen yang

independen pada 3 Januari 1943 lalu beralih menjadi Departemen Agama yang lalu beralih nama menjadi Kementrian Agama dengan K.H Wachid Hasyim sebagai menteri agama pertama.

Pada tahun 1943 kaum muslimin menduduki bagian yang memang tidak bisa dipandang rendah dalam politik yang ada pada masa pendudukan Jepang. Peran yang dirasa sangat penting adalah tugas utama yang diemban oleh umat Islam dalam pasukan-pasukan pertahanan Indonesia yang baru saja didirikan. Akhirnya di bidang sosio-religius selain dari beberapa aksi Jepang yang terbatas dan yang diperhitungkan untuk memenuhi tuntutan umat Islam yang merupakan inisiatif dari MIAI.

Pada awal 1943 *shumubu* menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pendekatan kepada para kyai dan ulama di desa untuk menjadikan propagandais Jepang. Usaha ini tentu dilakukan oleh Jepang yakni Gunseikan yang merupakan kepala pemerintah militer. Gunseikan mengalihkan kebijakan dengan merencanakan pengakuan pemerintah militer terhadap Kyai dan Ulama sebagai faktor utama dalam masyarakat Indonesia.

Jepang memiliki peran dan merupakan sesuatu yang dianggap sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia dan Nahdlatul Ulama diantaranya adalah dalam bidang pendidikan. Selama bulan Mei hingga Agustus tahun 1943 telah dilakukan pelatihan-pelatihan ulama yang dilakukan untuk memberikan jaminan pendidikan alat-alat propaganda pilihan. Pada awal Mei 1943 pemerintah militer mengumumkan langkah-

langkah untuk mengorganisasi Jaminan pendidikan sebagai alat propagandais. Bulan Juni kelompok pertama yang terdiri dari enampuluh kyai dan ulama harus menjalani pelatihan satu bulan di Jakarta yang diberi nama pelatihan kyai dibawah perlindungan dan pengawasan *Shumubu*. Pada bulan Agustus dan Nopember kelompok selanjutnya menyusul dengan tujuan untuk meluaskan kursus-kursus dan ini tidak terbatas hanya pada kyai atau ulama saja.

Meskipun efek dari pelatihan terhadap para ulama dan kyai tidak terlalu terlihat dan sulit dinilai, tetapi memiliki keuntungan pada keadaan dimana menempatkan posisi kyai pedesaan jauh lebih dalam peta politik administratif dibandingkan dengan pada masa pemerintahan Belanda. Pengakuan yang sama juga diberikan kepada ustadz-ustadz di madrasah dan pesantren sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gunseikan dalam permusyawaratan pemimpin-pemimpin pesantren dan madrasah seluruh Jawa dan Madura di gedung Masyumi tanggal 18-20 Januari 1944.

Pada akhir bulan yang sama Gunseikan memberikan edaran kepada para residen (*Shuchokan*) di semua provinsi Jawa yang berisi konsesi penting kepada kyai dan ulama dalam kegiatan agama. Harmonisasi yang muncul adalah bahwa sejak saat itu sebagian besar pemimpin agama dibebaskan dari kontrol langsung para pejabat pemerintahan. Para kyai dan ulama tidak perlu lagi meminta izin untuk melakukan kegiatan-kegiatan agama Islam atau pertemuan agama yang sebenarnya digunakan untuk sosialisasi kebijakan pemerintah. Pemerintah militer Jepang

agama tetapi juga pendidikan rakyat, pembela tanah air, kesehatan dan peningkatan hasil bumi.

Anjuran yang diberikan pemerintah pada awalnya memang kurang mendapatkan respon yang baik dari kyai-kyai NU dan masyarakat NU pedesaan, tetapi kemudian dijelaskan bahwa semua yang dilakukan oleh ulama bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang adalah upaya membela tanah air dan berkedudukan sebagai tentara Allah, sehingga banyak para Kyai NU pedesaan dan bersama para pengikutnya untuk ikut bergabung.

Kelonggaran yang diberikan pemerintah Jepang pada kegiatan-kegiatan keagamaan telah mendorong para kyai NU untuk semakin memantapkan tradisi keagamaan yang telah lama berlangsung seperti adanya pengajian, haul dan khataman. Tradisi Haul tetap dilaksanakan oleh warga NU seperti yang dilaksanakan pada haul Pangeran Diponegoro di pesantren Jatisalam Bagelan tanggal 7 Februari 1944.

Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Jepang dalam kegiatan keislaman telah dimanfaatkan secara baik dan kreatif oleh para Kyai NU untuk tetap melaksanakan tradisi keagamaan yang ada sejak awal. Seperti yang dilakukan oleh K.H Abdul Manaf Murtadlo dalam acara pemerintahan Dai Nippon dengan pegawai-pegawai perusahaan di Surabaya tanggal 2 Juni 1944. Untuk memperingati orang-orang yang meninggal akibat serangan dari sekutu. Acara ini diisikan dengan sholat ghaib, mengadakan pembacaan *tahlil* secara bersama-sama dan diakhiri

terjadi karena keadaan umat muslim yang saling membantu dan merupakan kepedulian antara umat Islam. Hizbullah sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan umat Islam dan NU, dimana ada sebuah wadah atau tempat yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk melakukan kegiatan yang dirasa sangat menguntungkan umat Islam.

B. Langkah-Langkah Harmonisasi yang dilakukan NU pada masa pendudukan Jepang

Harmonisasi yang dilakukan oleh Jepang dengan Islam di Indonesia sebenarnya telah ada sejak tahun 1920, persinggungan yang terjadi telah ada sejak saat itu terutama dengan Kyai- Kyai Pesantren dan Nahdlatul Ulama melalui surat kabar yang biasanya berbahasa melayu atau Arab.

Langkah pertama yang ditempuh oleh Jepang untuk menarik umat Islam dan tentu saja NU saat itu adalah dengan memberikan janji atau lebih dikenal dengan propaganda Jepang melalui 3A. Propaganda Jepang menawarkan kepada rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan setelah mendapat perlakuan yang dirasa sangat menyiksa bangsa Indonesia yakni pada masa kolonialisme Belanda. Sikap Jepang yang semakin menarik perhatian dari NU dan rakyat Indonesia semakin terlihat ketika tahun-tahun terakhir pemerintahan Kolonial Belanda. Pada saat itu masyarakat Nahdlatul Ulama merasa benar-benar pro terhadap Jepang.

dengan harapan kesetiaan. Selain diangkat menjadi pegawai pemerintahan. Para kyai diberikan kursus pelatihan kyai, pelatihan yang diberikan diantaranya adalah mengajarkan sejarah, kewarganegaraan, olahraga senam dan bahasa Jepang, yang merupakan pengalaman yang jarang didapatkan oleh para kyai pada saat itu.

Bagi masyarakat Indonesia, sikap Jepang terhadap agama Islam sangat ramah meskipun agama Islam tergolong sesuatu yang baru untuk orang Jepang. Pada tahun 1938 bersamaan dengan didirikannya masjid pertama di Jepang tepatnya di kota Tokyo oleh komunitas Turki, markas besar staf angkatan bersenjata mulai mendorong muslim Jepang untuk naik haji dan belajar di Kairo.

Di Indonesia khususnya di pulau Jawa Jepang mendirikan sebuah Kantor Urusan Agama (*Shumubu*) yang merupakan kantor setingkat departemen *Gunseikan* yang khusus untuk menangani agama Islam. Adanya *shumubu* merupakan cerminan betapa Jepang mementingkan agama Islam. Kegiatan yang merupakan penghormatan terhadap para kyai adalah bersafari ke tempat-tempat kyai terkenal, serta mengunjungi masjid dan pesantren yang berada di daerah-daerah dan merupakan kyai tradisional. Jika pada zaman Belanda, banyak aturan yang melarang para kyai menyinggung hal-hal tentang politik dalam khotbah dan pengajaran, namun pada masa Jepang aturan itu dihapuskan. Sebaliknya pada masa Jepang, kyai di dorong untuk menyampaikan pesan politik Jepang dalam pengajaran agama, pihak Jepang berharap dapat menjadikan mereka

dalam ibadah tetapi juga dalam hal kemajuan umat yang sebenarnya Jepang memiliki tujuan tersendiri mendekati umat Islam di Indonesia yang didalamnya NU berperan penting. Jepang memanfaatkan umat Islam untuk kebutuhannya dalam perang Asia Raya untuk mendukung Jepang mempertahankan diri sedangkan NU sendiri juga memiliki keuntungan dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Jepang yang memiliki janji akan membawa Indonesia merdeka dengan membentuk pasukan-pasukan yang berdaya guna bagi masyarakat Indonesia seperti Peta dan Hizbullah yang didalamnya terdapat banyak kaum santri dan para Kyai diberikan wewenang untuk memimpin organisasi bentukan Jepang.

3. Sejak awal kedatangan Jepang ke Indonesia adalah membawa janji akan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji yang diberikan oleh Jepang mendapatkan respon yang positif dari rakyat Indonesia yang memang sejak masa kolonial Belanda telah menginginkan negara yang merdeka dan Berdaulat. Kemajuan yang diperoleh NU pada masa pendudukan Jepang adalah Kyai Hasyim menjadi tokoh NU yang diberikan kepercayaan dalam memimpin organisasi bentukan Jepang dan berdampak pada kemajuan NU, selain itu Kyai Hasyim juga menjadi dewan penasihat pada PETA yang para anggotanya banyak juga dari kaum santri. Pelatihan militer yang diberikan kepada para santri adalah suatu bentuk kemajuan yang dirasakan oleh NU, karena pada masa penjajahan Belanda tidak pernah ada pelatihan semacam itu. Kyai tradisional yang merupakan kyai NU mendapat tempat yang tinggi dengan memiliki jabatan-jabatan khusus dipemerintahan,

